KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Kontroversi rumah aspirasi
Tanggal : Senin, 09 Maret 2015
Surat Kabar : Pelita
Halaman : 16

Kontroversi Rumah Aspirasi

Pada tahun ini, setiap anggota DPR akan memiliki rumah aspirasi di daerah pemilihan masing-masing. Anggarannya ditanggung oleh uang rakyat. Sebagian kalangan menilai ini pemborosan.



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

ANGGARAN Rp1,78 triliun sudah diketok untuk pengelolaan rumah aspirasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2015. Rumah aspirasi—benar-benar rumah dalam pengertian fisik—memang dirancang ada pada setiap daerah pemilihan anggota DPR. Dana Rp 1,78 triliun tersebut akan dibagikan kepada 560 orang anggota Dewan. Itu artinya, tiap-tiap anggota mendapatkan sekitar Rp150 juta per tahun atau Rp12,5 juta per bulan, yang ditransfer langsung ke rekening pribadi.

Dengan uang rakyat itu, nanti anggota DPR bisa membentuk sekretariat permanen, lengkap dengan tenaga ahli, staf administrasi, dan tenaga operasional di rumah aspirasi. Nah, aspirasi akan ditampung di rumah aspirasi itu. Aspirasi itu akan dibicarakan dan dipilah-pilah untuk dibawa anggota ke Senayan. Apalagi saat ini, anggaran untuk tenaga ahli pun bertambah, dari asalnya hanya dua orang menjadi lima orang, dan tenaga administrasi dari satu orang menjadi dua. "Rumah aspirasi ini semacam kantor perwakilan bagi anggota DPR di daerah pemilihan," kata Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Agung Budi Santoso.

Namun, sejak awal, program ini banyak mendapat tentangan dari para aktivis antikorupsi. Rumah aspirasi tersebut dianggap hanya akal-akalan politikus Senayan untuk menguras anggaran negara. Program Rumah Aspirasi, misalnya, tumpang-tindih dengan anggaran anggota DPR terkait penyerapan aspirasi.

Selama ini, setiap kali reses (biasanya per tiga bulan sekali atau empat kali dalam satu tahun), seorang anggota DPR mendapat Rp150 juta untuk mengunjungi konstituennya. Belum lagi ongkos perjalanan ke daerah pemilihan yang ditanggung negara sebesar Rp40 juta. Semua itu masih di luar tunjangan rutin per bulan Rp8,5 juta yang mereka terima sebagai "dana menyerap aspirasi". Karena itu, tak salah jika banyak pihak menilai rumah aspirasi merupakan "proyek" pemborosan uang negara yang dilegalkan.

Namun, Agung menepis semua itu. Katanya, Rp150 juta dana penyerapan aspirasi habis untuk mengganti ongkos konstituen yang datang ke acara pertemuan dan menyewa tenda serta perlengkapan lainnya. Apalagi, saat reses, anggota Dewan kerap melakukan lebih dari satu pertemuan dengan konstituen. Sementara, Rp40 juta adalah dana Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) pejabat negara sesuai standar Kementerian Keuangan. "Besarannya bergantung kepada daerah karena ada hitungannya yang mengacu kepada Standar Biaya Masukan yang dikeluarkan Menteri Keuangan."

Uniknya, anggota Fraksi Partai Demokrat Saan Mustopa mengaku, selama ini memanfaatkan jatah dana reses sebesar Rp150 juta dan akomodasi reses sebesar Rp40 juta untuk membiayai rumah aspirasinya, "Saan Mustopa Center", di Kota Karawang dan Karawang Utara, Jawa Barat. Dengan begitu, Saan tidak memakai uang pribadi untuk mengelola rumah aspirasi.

Pengeluaran rutin untuk dua rumah aspirasi Saan berkisar antara Rp 25 juta–Rp 30 juta per bulan. Biaya itu sudah mencakup uang sewa rumah, operasional rumah, serta gaji pegawai. "Tidak perlu menggunakan gaji pribadi. Kalau pintar mengelola uang reses, biaya untuk rumah aspirasi terjamin," kata Saan. Dia menambahkan, Rp12,5 juta per bulan yang kini dianggarkan cukup untuk pengelolaan rumah aspirasi secara sederhana.

Meski program rumah aspirasi baru dibuat tahun ini, sebenarnya sejumlah anggota Dewan sudah memiliki dan mengelola rumah aspirasi di daerah pemilihan masing-masing. Mereka yang telah memiliki rumah aspirasi biasanya menghabiskan biaya Rp20 juta-Rp 60 juta per bulan untuk mengelolanya alias melampaui dana Rp12,5 juta per bulan yang saat ini dianggarkan.

Sekretaris Fraksi Partai Golkar di DPR Bambang Soesatyo, misalnya, mengatakan, ia menghabiskan paling tidak Rp60 juta per bulan untuk mengelola rumah aspirasinya di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Rumah itu ia kelola dengan dana pribadi sejak 2009. Pengeluaran Rp60 juta itu, ujar Bambang, untuk upah sebelas orang pegawai sebesar Rp55 juta serta biaya perawatan rumah aspirasi sekitar Rp 5 juta per bulan. Ia tidak membayar sewa rumah karena memakai rumah pribadi.

Di luar kebutuhan rutin, ada pula anggaran untuk enam mobil operasional yang ditempatkan di tiga kabupaten, sebesar Rp 15 juta per bulan. Selain itu, Bambang juga rutin membagi uang stimulus Rp 15 juta ke tiga kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar dan Rp 12 juta untuk kecamatan di tiap kabupaten di daerah pemilihannya. "Kebutuhan di daerah pemilihan banyak rupanya. Maka, meski membantu, Rp12,5 juta per bulan itu sebenarnya terhitung kecil. Ujung-ujungnya tetap perlu uang pribadi," kata Bambang.

Hal senada diungkapkan anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Budiman Sudjatmiko. Untuk mengelola rumah aspirasi di daerah pemilihannya, Cilacap, Jawa Tengah, Budiman menghabiskan setidaknya Rp21,5 juta per bulan dari kantong pribadi. Pengeluaran itu mencakup Rp 20 juta untuk menggaji lima pegawai rumah aspirasi, uang sewa rumah sebesar Rp580,000, dan biaya lain sebesar Rp1 juta untuk disumbangkan ke konstituen yang membutuhkan.

Menurut Budiman, rumah aspirasi sebenarnya dapat dikelola dengan uang pribadi tanpa bantuan APBN. "Mengenai perlu tidaknya (dibiayai APBN), itu berkaitan dengan niat anggota DPR masing-masing. Selama ini, dengan uang pribadi saja, rumah aspirasi saya tetap jalan," kata Budiman.

Yang menjadi persoalan lain juga adalah kebiasaan buruk sebagian besar anggota DPR yang malas atau bahkan manipulatif dalam melaporkan pertanggungjawaban keuangan mereka. Sudah menjadi rahasia umum, ada anggota yang bisa membuat laporan reses ke fraksi padahal dia sama sekali tak pernah berkunjung ke daerah pemilihannya. Kongkalikong dengan pengurus partai di daerah adalah modusnya. Walhasil, laporan yang dibuat pun bukan yang sebenarnya terjadi. Masalahnya, fraksi malas memverifikasi setiap laporan.

Dalam konteks rumah aspirasi, hal yang sama bukan tak mungkin bisa terjadi. Harus ada mekanisme fraksi dan Sekretariat Jenderal DPR untuk memverifikasi sejumlah hal, misalnya benarkah ada rumah aspirasi di daerah pemilihan; berapa besar biaya pengelolaannya; benarkah rumah aspirasi itu aktif menjaring aspirasi rakyat atau hanya papan nama.

Saat ini pun, menjelang dana Rp150 juta per tahun cair April tahun ini, anggota DPR ternyata juga belum memiliki mekanisme operasional rumah aspirasi. Mereka belum menyusun rencana kerja, sistem pelaporan, dan model pengawasannya. Aturan bagaimana mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan pemakaian anggaran juga belum ada.

Agung Budi Santoso menjamin bahwa pelaporan penggunaan dana itu akan berlangsung transparan. "Pengguna anggaran itu sebetulnya Sekretariat Jenderal DPR. Jadi, kami melaporkan penggunaan uangnya ke fraksi dan Setjen DPR."

Budiman juga menjamin dia akan mempertanggungjawabkan penggunaan dana itu secara transparan. "Selama ini, karena memakai uang pribadi, saya merasa tidak perlu memublikasikan pengeluaran rumah aspirasi saya. Namun, jika memakai APBN, pengelolaannya harus transparan. Ke depan, bisa dilaporkan secara *online* agar bisa dipantau publik," kata Budiman dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.